



Media: Republika

Hari: Kamis

Tanggal: 07 Februari 2013

Halaman: 22

Jumlah DP4 Kota Yogyakarta

323.389 Jiwa

Yulianingsih

YOGYAKARTA — Jumlah Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kota Yogyakarta untuk Pemilu 2014 mendatang diperkirakan sebanyak 323.389 jiwa. Data ini merupakan warga Kota Yogyakarta wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditambah penduduk usia 16 tahun kurang dua bulan yang pada April 2014 nanti genap berusia 17 tahun dan menjadi wajib KTP.

"Jumlah DP4 ini per 5 Januari lalu," terang Kasie data dan informasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindikcapil) Yogya, Deddy Feriza, di Balai Kota Yogyakarta, Rabu (6/2).

Menurutnya, DP4 ini akan diserahkan Wali Kota Yogyakarta ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis (7/2) ini untuk dijadikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu 2014 mendatang.

Disebutkan, jumlah DP4 itu dipastikan akan berubah pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 mendatang. Pasalnya setelah dijadikan DPS, KPU akan melakukan pemutakhiran data dengan verifikasi lapangan terkait DP4 tersebut.

"Kita hanya memberikan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, dan alamat. Yang melakukan verifikasi untuk DPT, KPU sendiri," tandas Deddy. Perubahan jumlah DP4 dalam DPT tersebut tergantung banyaknya penduduk yang meninggal, pindah, dan datang hingga 2014.

Sementara itu, menurut Divisi Perencanaan Program Anggaran dan Logistik KPU Kota Yogyakarta, Sunaji, pihaknya akan membentuk tim ad hoc untuk memulai tahapan Pemilu 2014. Tim ini bertugas membantu menyiapkan berbagai tahapan dalam aturan kampanye menghadapi pemilu 2014.

Lebih jauh Sunaji menjelaskan, pembentukan tim tersebut untuk mengantisipasi keterlambatan anggaran dari Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan tahapan Pemilu. Sebab meski tahapan Pemilu sudah dimulai sejak awal Januari 2013 lalu, namun anggaran tetap belum turun.

"Selama ini kami masih gunakan anggaran administrasi KPU yang dialokasikan Rp 1,2 miliar per tahun. Meski anggaran khusus pemilu belum turun, tapi semoga tidak mengganggu persiapan kami," ujarnya, menambahkan.

Fungsi utama pembentukan tim ad hoc itu, kata dia, adalah menyiapkan petugas pemutakhiran data calon pemilih Pemilu, petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta Petugas Pemungutan Suara (PPS). Sehingga saat anggaran khusus serta aturan teknis dari KPU RI diterbitkan, maka KPU Kota Yogyakarta bisa langsung bergerak cepat.

"Kamis (7/2) ini, KPU Kota Yogyakarta juga harus mulai merancang DPS. Karenanya kita perlu petugas pemutakhiran data," tambahnya.

■ ed : yusuf assidiq

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005